BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan bab terakhir dengan konten berupa simpulan dan saran penelitian. Baik simpulan dan saran penelitian yang dideskripsikan pada bab V, didasarkan pada hasil dan temuan penelitian yang sudah dilakukan secara seksama oleh penulis. Adapun cara penyusunannya didasarkan pada rumusan masalah penelitian yang sudah dijawab pada bab IV yaitu temuan dan pembahasan. Apabila bab IV kontenya diisi dengan hasil penelitian yang dideskripsikan secara rinci dan terstruktur, maka bab V adalah simpulannya beserta saran-saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih sempurna. Simpulan dan saran yang ditulis oleh peneliti adalah sebagai berikut:

5.1. Simpulan

Penulis dalam penelitian yang berjudul "Perbandingan Pandangan Surat Kabar *Suluh Indonesia* dan *Indonesia Raya* Terhadap Kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II Tahun 1956-1957" menentukan beberapa simpulan setelah menjawab rumusan masalah penelitian pada bab IV secara rinci. Adapun simpulan yang penulis tentukan dalam bab ini didasarkan pada: (1) kebijakan kabinet Ali Sastroamidjojo II, (2) Pemberitaan surat kabar *Suluh Indonesia* terhadap kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II, (3) Pemberitaan surat kabar *Indonesia Raya* terhadap kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan (4) Perbandingan Pemberitaan (*News*) dan Pandangan (*Views*) surat kabar *Suluh Indonesia* dan *Indonesia Raya* ditinjau dari Tajuk Rencana, Catatan Pojok, atau Karikaturnya terhadap kebijakan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Keempat dasar yang disebutkan di atas disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis ajukan sekaligus sudah dibahas.

Terlebih yang harus diketahui pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia, pers merupakan suatu media yang sangat penting bagi para masyarakat untuk mengetahui kabar mengenai kondisi Indonesia, pers yang populer pada masa tersebut yaitu dalam bentuk surat kabar. Pers sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama, Pers Partisipan merupakan sebuah pers yang berafiliasi dengan suatu kekuatan politik dengan kata lain menjadi sebuah organ dalam pemberitaan yang

menjunjung salah satu partai politik. Contoh dari pers partisipan pada masa Demokrasi Liberal yaitu *Suluh Indonesia* dari PNI, *Duta Masyarakat* dari NU, *Harian Rakyat* dari PKI, dll. Kemudian ada juga yang disebut Pers Independen dimana pers jenis ini tidak terikat dengan suatu kekuatan politik manapun, menyajikan suatu berita yang lugas, kritis dan netral dan menghindarkan pemberitaan politik yang berat sebelah dan menguntungkan suatu pihak. Contoh dari pers ini seperti Indonesia Raya, Merdeka, Pedoman,dll. Dengan beragam latar belakang yang dimiliki oleh jenis-jenis pers tersebut pasti setiap pers pada masa Demokrasi Liberal memiliki karakteristik pemberitaan dan kepentingan yang beragam pula.

Ciri lain dari Demokrasi Liberal di Indonesia yaitu pada masa ini sering terjadi pergantian kabinet yang memerintah. Terhitung 7 kabinet pun silih berganti menduduki pemerintahan Indonesia, tak terkecuali Ali Sastroamidjojo pun pernah merasakan menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Dalam penelitian penulis ini pemerintahan yang dikaji yaitu kabinet Ali Sastroamidjojo II. Ketika menjabat Ali Sastroamidjojo memiliki program kerja yaitu Perjuangan merebut kembali Irian Barat, Pembatalan Perjanjian Konferensi Meja Bundar, Memulihkan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, pendidikan serta pertanian dan Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika.

Setiap program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II tak lepas mendapatkan perhatian dari masyarakat, pers dan seluruh masyarakat Indonesia. Maka dalam penelitian ini akan mengkaji pandangan dari pihak pers terhadap kebijakan tersebut, pers yang dikaji pun difokuskan terhadap surat kabar *Suluh Indonesia* dan *Indonesia Raya*.

Pemberitaan dari surat kabar *Suluh Indonesia* yaitu pertama mengenai Perjuangan Irian Barat, pemberitaan dari surat kabar ini dinilai lebih banyak memuat unsur berita yang berdasarkan fakta dan realita namun terkesan lebih mendukung satu elemen dalam memberitakan kejadian., Surat kabar *Suluh Indonesia* berpandangan lebih menitikberatkan pada peran rakyat Indonesia dan pemuda dalam mengembalikan Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Walaupun beberapa daerah yang dengan dengan Irian Barat sudah berkoalisi dan mendukung pembebasan Irian Barat, namun peran masyarakat diperlukan dalam

rangka mengembangkan dan mengembalikan Irian Barat menjadi bagian dari negara Indonesia. Sedangkan pandangan Pembebasan Irian Barat dalam surat kabar *Indonesia Raya* dinilai lebih proaktif dan menjelaskan kondisi sebenarnya dimana pembuatan RUU pembebasan Irian Barat sudah direncanakan namun dalam pelaksanaanya hanya mengandalkan orang-orang dalam pemerintahan saja bukan melibatkan warga asli dari Irian Barat yang menyebabkan kecaman dari beberapa pihak dan pada akhirnya masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih mengutamakan pembangunan di daerah timur terutama di daerah Irian Barat.

Kebijakan selanjutnya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II yaitu mengenai Pembatalan Perjanjian KMB. Surat kabar Suluh Indonesia berpandangan bahwa seakan-akan pemerintah Indonesia menyatakan dengan tegas tidak akan membayar hutangnya terhadap Belanda, namun pada kenyataannya pemerintah Indonesia dalam membatalakan perjanjian KMB tidak dilakukan secara tegas dan berlangsung secara berlarut-larut dan alot. Selain itu surat kabar ini terlihat sangat mengagungkan dan membela keberhasilan kabinet Ali Sastroamidjojo II ini dalam membatalkan perjanjian KMB dan membuat Belanda geram atas sikap Indonesia yang melanggar aturan dan perjanjian yang dilakukan kepada pihak Belanda. Sedangkan pemberitaan dari surat kabar *Indonesia Raya* pandangan yang dimuat dalam artikel terkesan lebih berani karena artikel Pembatalan KMB dinilai berani dalam mengkritik pemerintahan karena pemerintah pusat masih bersifat ragu-ragu dalam memperjuangkan nasionalisasi Indonesia. Hal itu karena negara Indonesia masih belum matang dalam mengambil keputusan seperti pemerintah Mesir yang menasionalisasi bangsa dari pemerintah inggris dengan cara yang tegas dan berani. Sehingga dalam surat kabar tersebut pemerintah Indonesia dituntut untuk lebih tegas namun tetap santun dalam membatakn perjanjian KMB dengan Belanda.

Kemudian program kerja terakhir dari kabinet Ali Sastroamidjojo II yang terakhir mengenai memulihkan keamanan daerah Indonesia dengan mengatasi pergolakan-pergolakan yang terjadi di daerah. Pandangan dari surat kabar *Suluh Indonesia* yaitu bahwa konflik yang terjadi di daerah disebabkan adanya pelarangan dari pemerintah dalam ekspor impor barang ke negara lain dari daerah dan harus terpusat. Sehingga masyarakat pun menolak dan mengecam pelarangan tersebut hingga ditemukannya seorang keturunan Tionghoa yang merupakan anak buah

DI/TII di Aceh dan ditemukan banyak sekali penyelundupan bahan hasil alam untuk dijual ke negara asing dan dana yang dihasilkan digunakan untuk membeli persenjataan dan juga adanya pertentangan dari pihak ulama dan melakukan pemberontakan dari pihak Aceh yang ingin mendirikan negara islam dan memisahkan diri dari negara Indonesia. Sedangkan dari pandangan surat kabar *Indonesia Raya* terjadi pergolakan di daerah Sumatera karena adanya kekecewaan dari warga Sumatera karena keputusan terpusat di pemerintah bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga kekecewaan dewan banteng terhadap pemerintah pusat menyebabkan adanya pernyataan bahwa rakyat Sumatera mosi terhadap pemerintah pusat. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kebebasan dan pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi dan juga pendapat rakyat melainkan diputuskan secara sepihak oleh pemerintah sehingga terjadi banyak sekali penolakan.

Bila dibandingkan antara pandangan pada surat kabar *Suluh Indonesia* dan *Indonesia Raya* terhadap program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo II, perbedaan pandangan terjadi pada dua surat kabar tersebut. dapat dilihat dan dibuktikan bahwa pemberitaan di Surat kabar *Suluh Indonesia* tergolong juga terkesan membanggakan kabinet Ali Sastroamidjojo II dan pro terhadap pemerintahan pusat. Sedangkan surat kabar *Indonesia Raya* dinilai lebih netral dan lebih banyak memberitakan tentang kondisi faktual dari negara Indonesia sendiri, lebih menjunjung nasionalisme dan juga mempertahankan keutuhan NKRI dengan memperjuangkan keputusan pers yang bebas, netral dan lebih adil untuk semua pihak.

5.2. Saran

Penelitian terhadap pandangan surat kabar *Suluh Indonesia* dan *Indonesia Raya* setidaknya bisa memberikan beberapa kontribusi bagi bidang disiplin sejarah dan pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, masih jarang sekali dibahas mengenai peranan pers pada masa Demokrasi Liberal. Kemudian penelitian ini dapat menjadi suatu rujukan atau referensi bagi pembelajaran sejarah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederjat. Materi dalam penelitian ini relevan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

(KI & KD) mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII. Materi penelitian ini dapat menunjang KD 3.4 yaitu mengenai menganalisis perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal.

Penelitian ini pun dapat menunjang perkuliahan khususnya bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah UPI. Materi penelitian ini dapat menambah referensi bagi para mahasiswa terutama dalam Mata Kuliah Sejarah Demokrasi Liberal Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi rujukan baik bagi mahasiswa maupun kalangan umum yang ,enaruh minat pada kajian sejarah pers, khususnya mengenai peranan pers ketika masa Demokrasi Liberal Indonesia.

Penulis merasa penelitian mengenai peranan pers ketika masa Demokrasi Liberal khususnya surat kabar Partisipan dan Independen masih jarang diteliti oleh para sejarawan, sehingga masih ada kesempatan untuk mendalami dan mengeksplorasi mengenai penelitian ini. Penulis merekomendasikan beberapa bahan kajian terkait pandangan surat kabar Suluh Indonesia dan Indonesia Raya. Pertama, surat kabar Suluh Indonesia merupakan organ media dari Partai Nasional Indonesia, masih bisa dilihat bagaimana pemberitaan dan pandangan dari surat kabar ini ketika lawan politiknya menjabat sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia. Kedua, perkembangan surat kabar Indonesia Raya hingga akhirnya dibredel dan tidak menerbitkan pemberitaan lagi. Ketiga, masih banyak surat kabar sejenis dan berasal dari golongan yang beragam, kesempatan untuk mengkaji pandangan dalam memberitakan kabinet yang memerintah pada masa Demokrasi Liberal. Demikian beberapa rekomendasi dari penulis terkait penelitian ini. Penulis mengharapkan penelitian skripsi mengenai pandangan surat kabar Suluh Indonesia dan *Indonesia Raya* dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih yang berharga baik bagi pendidikan di Indonesia maupun bagi ranah keilmuan sejarah.